

TREND TREND MONEY POLITIK PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SABANG

NAMA TIM (KETUA : Dr. Effendi Hasan, M.A ANGGOTA 1 : Muliawati, S.IP., M.IP ANGGOTA 2 : Helmi, S.IP.,M.IP)

SUMBER DANA: PNPB UNSYIAH



SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA
8 DESEMBER 2020

PENDAHULUAN

Money politik pada dasarnya bukan persoalan baru yang dihadapi pada setiap kontestasi politik di Indonesia melainkan praktek money politik ini sudah megakar pada kultur demokrasi kita yang begitu mudah suara untuk dibeli oleh aktor-aktor politik yang memainkan peran untuk kepentingan pribadinya maupun kelompoknya. Serta money politik juga memiliki Trend yang dilakukan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat pada kontestasi politik Sabang. Trend money politik di Kota Sabang memiliki kualifikasi dan diskualifikasi. Maksud dari istilah kualifikasi ini adalah uang yang diberikan pada pemilu dengan nominal yang tinggi yang dianggap lolos pada tahapan pertama sehingga sampai pada tahapan berikutnya, sedangkan diskualifikasi adalah uang yang diberikan kepada pemilih dengan nominal yang rendah dapat dipastikan kalah dan tidak dapat lolos pada tahap selanjutnya, sedangkan final adalah babak penentuan akhir ini biasanya pemilih menentukan nominal tertinggi untuk pembelian suara dari masyarakat. Patokan tersebut menjadi standar bahwa pemenang pemilu di Kota Sabang harus berani membayar pemilih dengan angka yang tertinggi misalnya ada calon memberikan uang satu juta per orang, melainkan calon yang hanya dibawah standar tersebut sudah dipastikan diskualifikasi atau dapat dipastikan kalah dari kontestasi politik.

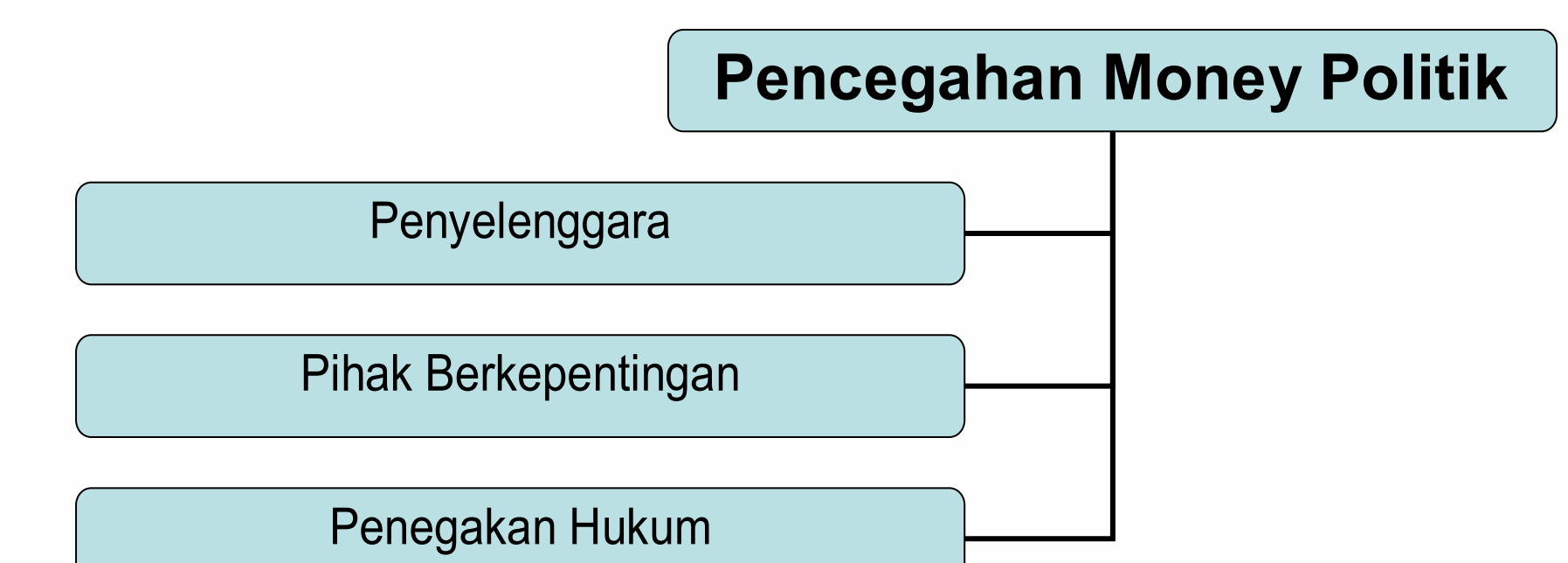
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion) di Aula BPKS Sabang yang melibatkan beberapa unsur terkait seperti Tokoh masyarakat, Bawaslu, KIP, dan Mahasiswa. Pada tahapan pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL CAPAIAN

Hasil penelitian menunjukkan trend money politik di Kota Sabang memiliki 3 pola, *Pertama*, diskualifikasi adalah Caleg dianggap tidak memiliki harapan lagi untuk dapat masuk kepada tahapan selanjutnya, karena jumlah uang yang diberikan kepada pemilih nominalnya kecil dan potensi untuk menang berat serta jauh dari perkiraan. *Kedua*, kualifikasi disebut adalah babak penyisihan yang menjadi sebuah ukuran ataupun patokan Caleg yang memberikan uang pada tahap awal yang dapat dianggap dukungan pemilih masih bertahan dengan ukuran nominal uang yang diberikan kepada pendukung dan dapat menuju pada tahap selanjutnya. *Ketiga*, pada tahapan terakhir dalam trend money politik biasanya disebut dengan istilah final atau babak penentuan bagi Caleg yang berpeluang lolos sebagai pemenang dalam kontestasi politik pemilu 2019 di Sabang. Untuk mencegah trend money politik di Sabang perlu adanya konsep yang jelas, serta komitmen lembaga pelaksana pemilu dan pengawasan seperti KIP dan Bawaslu saling bersinergi untuk penguatan sistem untuk memutuskan mata rantai money politik. Upaya pencegahan money politik di Sabang, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Penelitian ini akan dipublikasikan di Journal International of Criminology and Sociology.



DOKUMENTASI



KESIMPULAN

Trend money politik di Sabang sangat massif dibandingkan dengan daerah lain di Aceh, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah DPT yang sedikit dan administrasi wilayah yang kecil memungkinkan para aktor politik melakukan money politik. Untuk pencegahan money politik sudah dilakukan oleh KIP Sabang dan Bawaslu dalam berbagai upaya yang dilakukan dengan kebijakan maupun penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan, dkk., 2014, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Alexander, Herbert E. 1984. *Financing Politics: Money, Election, and Political Reform*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Aspinall, Edward. 2015. Money Politics: Patronage and Clientelism in Southeast Asia', in William Case (ed.), *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon and New York, pp. 299-313.
- Blondel, Jean (1969), "Electoral System and the Influence of electoral System on Party System," dalam *An Introduction to Comparative Government*, London: Weindelfield and Nicholson.